

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian tidak bisa lepas dari berbagai aktivitas produksi, perdagangan dan konsumsi. Sumber daya keuanganpun menjadi poin penting dalam mendukung kegiatan perekonomian guna pengembangan bisnis baru untuk menciptakan peluang pertumbuhan. Masyarakat, perusahaan dan organisasi mencoba mencari sumber daya keuangan untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan. Namun, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman keuangan dibandingkan dengan perusahaan dan organisasi. Di masa silam, koperasi kredit (*credit union*) pertama kali muncul untuk memenuhi kebutuhan finansial suatu kategori tertentu yaitu para petani (Diaconu & Oanea, 2014).

Banyaknya informasi dan hal-hal baru yang muncul dalam segala aspek kehidupan, termasuk pada dunia keuangan dan ekonomi. Dunia keuangan yang pernah diwarnai oleh serangkaian pergeseran struktural selama krisis keuangan. Banyak bank dan lembaga keuangan mengalami gejolak selama krisis keuangan, sehingga menimbulkan risiko tinggi di pasar keuangan yang dikenal sebagai risiko sistemik. Salah satu penyebab terjadinya krisis diwakili oleh adanya globalisasi di bidang keuangan yang menyebabkan ketidakstabilan keuangan di seluruh dunia dan meningkatkan resesi global yang besar, akibat adanya interaksi progresif dan integrasi ekonomi di seluruh dunia (Das, 2006).

Krisis keuangan global tersebut telah menyebabkan serangkaian kegagalan bank. Krisis keuangan juga menyoroti pentingnya sistem keuangan yang stabil yang dapat mengatasi guncangan keuangan dan ekonomi. Masalah

keuangan dan stabilitas bank selalu menjadi perhatian bagi bank sentral di setiap negara, karena kestabilan perbankan berimplikasi langsung pada keberlangsungan industri perbankan itu sendiri.

Ketidakstabilan dalam sistem perbankan juga memberikan dampak pada ketidakstabilan pada industri lain (Northcott, 2004). Karena bank memegang aset keuangan konsumen dan produsen, serta memiliki kedudukan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu bila terjadi ketidakstabilan pada bank akan menimbulkan kerugian biaya yang besar. Bank juga terhubung dengan suatu jaringan (pasar antar barang dan sistem pembayaran), ketika terjadi guncangan pada satu bank maka akan menimbulkan guncangan juga pada bank lain (penularan).

Para pembuat kebijakan telah berupaya untuk mereformasi sistem perbankan guna untuk meningkatkan stabilitas bank dalam menanggapi krisis keuangan global (Cihak *et al.*, 2016). Selain itu, karena sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung melalui sektor perbankan, maka efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter dan efisiensi alokasi sumber pendanaan dalam sistem perekonomian perlu ditingkatkan (Warjiyo, 2006). Dengan peran penting tersebut, kesehatan dan stabilitas perbankan merupakan dua hal pokok yang harus dijaga, meskipun dalam praktiknya, ketidakstabilan dan kegagalan bank sering terjadi. Sehingga menjaga stabilitas bank menjadi topik serius bagi pembuat kebijakan, baik di negara berkembang maupun negara maju (Beck *et al.*, 2009).

Salah satu bentuk kebijakan untuk mendorong stabilitas pasca terjadinya krisis keuangan di tahun 2008-2009 adalah implementasi Basel III dan pembentukan Financial Stability Board (Casu *et al.*, 2014; Cihak *et al.*, 2016).

Selain itu setelah adanya krisis keuangan tersebut memunculkan topik baru yang menarik untuk diulas, yaitu inklusi keuangan. Karena krisis tersebut merupakan dampak dari krisis yang melanda kelompok *bottom of pyramid* atau kalangan dengan daya beli rendah.

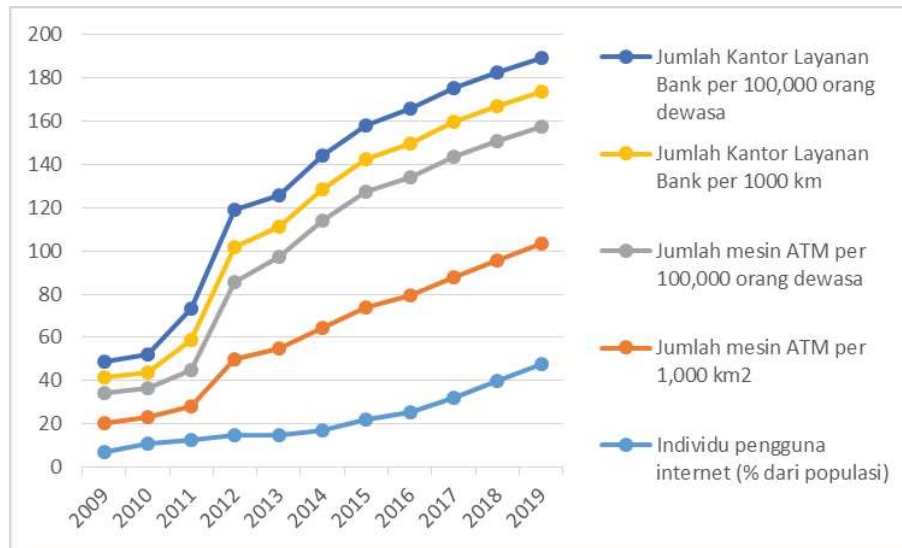
Pada umumnya kelompok *bottom of pyramid* merupakan kelompok yang tidak terakses jasa perbankan atau biasa disebut sebagai masyarakat *unbanked*. Kelompok *unbanked* sulit mengakses layanan jasa perbankan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan dan ketidaksesuaian produk yang ditawarkan lembaga keuangan terhadap kebutuhan masyarakat (Dienillah & Anggraeni, 2016). Sehingga peran inklusi keuangan sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada dasarnya inklusi keuangan merupakan bentuk kemudahan akses ke layanan perbankan seperti simpanan dan kredit (Morgan & Pontines, 2014). Yang mana akses tersebut memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk mengakses layanan keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (Cámara & Tuesta, 2014). Dalam kegiatan G20 *Pittsburgh Summit* 2009, disepakati perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok *unbanked* tersebut (Bank Indonesia, 2019). Terdapat 9 *Principles for Innovative Financial Inclusion* yang dihasilkan dari pertemuan Toronto Summit di tahun 2010, sebagai pedoman pengembangan inklusi keuangan. Prinsip tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework* (ATISG, 2010).

Pembangunan sektor keuangan melalui inklusi keuangan telah gencar dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan adanya manfaat dari penyediaan jasa akses ke layanan keuangan

terhadap pengentasan kemiskinan melalui budaya menabung, penghematan, dan juga menciptakan mekanisme pembayaran yang efisien dan rendah biaya (Dixit & Ghosh, 2014). Diperkuat dengan kondisi akses keuangan Indonesia seperti yang dimuat dalam Booklet Inklusi Keuangan, bahwa berdasarkan Survei Bank Dunia (2010) hanya 49% rumah tangga Indonesia yang mengakses lembaga keuangan formal, dan Survei Neraca Rumah Tangga (2011) yang menunjukkan presentase rumah tangga yang menabung di lembaga formal ataupun lembaga non-keuangan sebesar 48% (Buku Saku Keuangan Inklusif BI, 2014). Oleh karena itu, pada bulan Juli 2012 Bank Indonesia berkolaborasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2PK) serta badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengeluarkan SNKI atau yang disebut Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Profil inklusi keuangan di Indonesia saat ini diawali dengan semakin banyaknya individu yang mengakses layanan internet, serta diiringi dengan penambahan jumlah mesin ATM dan kantor layanan bank yang terus meningkat di tiap tahunnya. Pada grafik Gambar 1.1 memberikan gambaran tingkat inklusi keuangan Indonesia yang semakin baik di tiap tahunnya.



Gambar 1.1 Pembangunan Teknologi Digital di Indonesia

Sumber: Statistik Sistem Keuangan Indonesia, BI dan BPS, 2020 diolah

Munculnya berbagai temuan teknologi inovatif dalam sistem perbankan dengan memanfaatkan kecanggihan ponsel serta internet dapat memperluas jangkauan layanan perbankan. Penggunaan mobile/internet banking memudahkan terciptanya penyediaan layanan perbankan tanpa adanya cabang bank secara fisik (*branchless banking*). Layanan dengan bentuk *branchless banking* memungkinkan masyarakat memperoleh layanan perbankan di mana saja dan kapan saja.

Dalam penelitian Zahangir *et al.* (2013) menunjukkan bahwa *mobile banking* dan *internet banking* dapat meningkatkan aktivitas perbankan, mempercepat transaksi keuangan dan memberikan layanan keuangan yang lebih baik dengan akurasi, keandalan, dan keamanan. Hal tersebut membuat penggunaan *mobile banking* dan *internet banking* semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Selain pemanfaatan penggunaan *mobile/internet banking* yang semakin beragam, juga ada beberapa inovasi teknologi lain seperti ATM, penggunaan kartu debit/kredit, e-Money, dll.

Semakin banyaknya ketersediaan infrastruktur digital di daerah terpencil dengan dibukanya lebih banyak pusat literasi keuangan dan penyaluran kredit kepada kalangan *unbanked* juga dapat membantu memenuhi manfaat dari inklusi keuangan (Barik & Sharma, 2019). Tingkat inklusi keuangan yang tinggi pada perbankan berkontribusi terhadap stabilitas bank yang lebih baik. Hal tersebut terlihat pada bank-bank yang memiliki tingkat DPK yang tinggi namun mengeluarkan biaya yang rendah dalam menyediakan layanan perbankan, sehingga kestabilan bank tersebut cenderung lebih baik (Ahamed & Mallick, 2017).

Namun di beberapa studi lain dikatakan bahwa inklusi keuangan dan stabilitas keuangan dapat memberikan dua efek yang berbeda. Efek positif berupa peningkatan kesejahteraan rumah tangga karena adanya kemudahan akses keuangan bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Efek negatif jika lembaga keuangan menahan risiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan, juga mendorong inklusi keuangan (Amatus & Alireza, 2015). Karena ketika bank berusaha menahan risiko sistemik, dapat mengakibatkan mengurangi fasilitas jasa keuangan yang diberikan kepada kelompok yang berpenghasilan rendah.

Selain pengaruh dari inklusi keuangan, sejumlah literatur menyebutkan bahwa stabilitas/instabilitas bank dapat disebabkan oleh faktor makroekonomi dan karakteristik individual bank (Baselga-pascual *et al.*, 2015; Carreta *et al.*, 2014; Shim, 2019). Dalam kaitan ini, volatilitas yang terjadi pada variabel makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, suku bunga dan inflasi juga dapat mempengaruhi risiko bank yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas bank (Chaibi & Ftiti, 2015; Karim *et al.*, 2016; Nkusu, 2011). Selanjutnya beberapa faktor spesifik bank seperti permodalan, ukuran

bank, pemberian cadangan kredit ditemukan menjadi penentu stabilitas di lembaga perbankan.

Ukuran bank juga dianggap sebagai hal penting dalam menentukan profitabilitas bank. Bank dengan tingkat profitabilitas yang baik tentu memiliki tingkat kestabilan yang lebih terjaga. Beberapa penelitian telah menyelidiki hubungan antara ukuran bank dan profitabilitas. Ukuran bank juga menjadi penentu profitabilitas bank. Menurut hipotesis *market power*, bank dengan pangsa pasar yang besar dan memiliki kualitas produk yang baik mampu menggunakan kekuatan pasar dalam menentukan harga produk tersebut untuk mendapatkan keuntungan di atas rata-rata. Selain itu dalam sektor perbankan, bank-bank yang besar mendapatkan keuntungan dari adanya skala ekonomi dan keuntungan lain yang berhubungan dengan pangsa pasar bank tersebut (Goddard *et al.*, 2004).

Kecukupan modal yang digambarkan oleh *Capital Adequacy Ratio* juga mampu menangkap kesehatan bank secara umum. Menicucci dan Paolucci (2016) menyatakan bahwa struktur permodalan yang kokoh sangat penting bagi lembaga keuangan, karena menambah kekuatan untuk menghadapi krisis keuangan dan untuk mengkonsolidasikan keamanan bagi deposan selama kondisi perekonomian tidak stabil. Demikian pula, Bourke (1989) mengemukakan bahwa bank-bank yang memiliki modal tinggi bisa menikmati akses ke sumber dana yang lebih murah dengan tingkat resiko yang minim. Sehingga, bank dengan struktur permodalan yang lemah tidak akan tahan menghadapi situasi yang membahayakan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menjaga struktur permodalan guna menahan kerugian dan untuk mengurangi risiko kebangkrutan selama masa-masa sulit.

Selain itu untuk memitigasi risiko guna menjaga kestabilan, bank akan menyisihkan sejumlah dana sebagai bantalan untuk menyerap kerugian kredit. Salah satu langkah terpenting adalah membuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Penyisihan kerugian kredit merupakan penyisihan kerugian kredit atas portofolio kredit dan pendanaannya yang terjadi penurunan nilai ekonomis (Budiarti, 2012). Oleh karena itu, penyisihan kerugian kredit merupakan alat penting yang digunakan untuk mengurangi risiko kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank. Beatty dan Liao (2011), mendefinisikan CKPN sebagai kebijakan yang diikuti oleh bank komersial dengan menyisihkan sejumlah uang (cadangan) untuk menghadapi potensi gagal bayar pinjaman, yang pada gilirannya akan membantu melindungi posisi bank dalam hal profitabilitas dan modal.

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Perbankan di Indonesia

Indikator (Bank Umum)	Unit	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Q4	Q4	Q4	Q4	Q4	Q4
CAR	%	19,57	21,39	22,93	23,18	22,97	23,4
ROA	%	2,85	2,32	2,23	2,45	2,55	2,47
NIM	%	4,23	5,39	5,63	5,32	5,14	4,91
BOPO	%	78,29	81,49	82,22	78,64	77,86	79,39
LDR	%	89,42	82,48	82,17	82,49	82,28	82,60
Jumlah Dana Pihak Ketiga	Rp miliar	3.943.697	5.952.279	6.570.903	7.177.549	7.667.803	8.280.812
total Kredit ke Pihak Ketiga	Rp miliar	3.526.364	4.909.707	5.399.210	5.921.039	6.308.824	6.839.563
Jumlah Aset Perbankan	Rp miliar	5.615.150	6.095.908	6.729.799	7.387.634	7.913.491	8.562.974

Sumber: Statistik Perbankan (2019)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa sistem perbankan Indonesia relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terlihat dari nilai beberapa indikator perbankan, seperti CAR dan ROA (lihat Tabel 1.1). Dalam tabel 1.1

rata-rata Net Interest Margin (NIM) cenderung bergerak secara fluktuatif selama lima tahun terakhir. Dari sisi efisiensi, dengan melihat nilai rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), terlihat bahwa efisiensi bank dalam lima tahun terakhir ini bervariasi meskipun terdapat indikasi cenderung lebih membaik pada tahun 2019. Secara keseluruhan, terdapat indikasi bahwa stabilitas perbankan mengalami kondisi yang berubah-ubah pada beberapa aspek di atas dalam beberapa tahun terakhir.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya Ahamed dan Mallick (2017); Sakarombe (2019); Van *et al.* (2020). Pertama, penelitian ini mengukur pengaruh dari variabel inklusi keuangan dan karakteristik bank terhadap stabilitas perbankan, hal tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya Sakarombe (2019) bahwa stabilitas perbankan yang memiliki masalah endogenitasas hanya diukur berdasarkan tingkat inklusi keuangan dan pengaruh faktor Makroekonomi di suatu negara. Begitu juga Ahamed dan Mallick (2017) mengukur stabilitas bank menggunakan analisis lintas negara berdasarkan bank, spesifik negara, dan karakteristik kelembagaan di beberapa negara. Kedua, objek penelitian pada studi sebelumnya Van *et al.* (2020) menggunakan lingkup penelitian stabilitas perbankan di tingkatan negara Asean, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian negara Indonesia dengan ruang lingkup data bank kategori buku 3 dan 4 dalam kurun waktu 2009-2019.

Melihat gencarnya inovasi teknologi dibidang keuangan di negara Indonesia yang dapat memberikan pengaruh pada stabilitas perbankan. Maka penulis mengangkat judul “**Analisis Stabilitas Perbankan di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah berupa :

1. Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh karakteristik perbankan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik perbankan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Praktis
 - a. Memberikan masukan bagi bank untuk membuat kebijakan terkait perluasan inklusi keuangan yang dapat meningkatkan stabilitas sektor perbankan di Indonesia
 - b. Dapat menjadi rujukan penelitian bagi penulis yang meneliti topik inklusi keuangan dan stabilitas perbankan

2. Secara Teoritis, dapat memberikan gambaran pemahaman mengenai pengaruh Inklusi Keuangan dan Karakteristik Perbankan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia